

**DOKUMEN PROSES PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT BPPM
DI DESA JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK**

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
1.	04-Jun-07	Penawaran Kerjasama Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat untuk PNS Pemda Kab. Blitar	Direktur PT BPPM
2.	18/06/2007 028/199/409.306/2007	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tim Pendayagunaan Aset Pemkab Blitar terkait pembangunan perumahan di Desa Jatilengger.	Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah
3.	14/07/2007 05/BPP/SP/VII/2007	Permohonan Izin (untuk mengawali pembangunan)	Direktur PT BPPM
4.	23-Jul-07	Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Bina Peri Permai Malang Jawa Timur	Bupati , Dirut PT BPPM, Ketua DPRD
5.	01/08/2007 09/BPP/VIII/2007	Permohonan Izin Lokasi	Dirut PT BPPM
6.	30/08/2007 520/44/409.013/2007	Persetujuan Penanaman Modal Pembangunan Perumahan Sederhana di Kabupaten Blitar	Bupati
7.	19-Sep-07	Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Bina Peri Permai Malang tentang Pembangunan Perumahan Sederhana Puri Ponggok Indah untuk PNS, TNI/PORI, dan Masyarakat di Lingkungan Pemkab	Bupati dan Dirut PT BPPM
8.	19/09/2007 No. 591 Th. 2007	Keputusan Bupati Blitar tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Usaha Pembangunan Perumahan Puri Ponggok Indah di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok	Bupati
9.	20/09/2007 028/330/409.306/2007	Surat Bupati kepada Ketua DPRD Kab. Blitar perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah milik Pemkab Blitar untuk Pembangunan Perumahan PNS, TNI/POLRI dan Masyarakat oleh PT. BPPM.	Bupati
10.	25/09/2007 170/644/409.040/2007	Surat Ketua DPRD Kab. Blitar tentang Persetujuan Pelepasan Tanah milik Pemkab Blitar untuk Pembangunan Perumahan PNS, TNI/POLRI dan Masyarakat oleh PT. BPPM.	Ketua DPRD
11.	19/11/2007 No. 811 Th. 2007	Keputusan Bupati tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Blitar Untuk Pembangunan Perumahan PNS, TNI/POLRI Dan Swasta	Bupati
12.	09/01/2008 017/BPPM/I/2008	Surat PT BPPM perihal Permohonan Tambahan Pasal Perjanjian	Dirut PT BPPM
13.	21-Jan-08	Perjanjian Tambahan (Addendum) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Bina Peri Permai Malang	Bupati dan Dirut PT BPPM

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
14.	03/03/2008 170/112/409.040/2008	Surat Ketua DPRD kepada Bupati tentang Pencabutan Surat DPRD Kabupaten Blitar Nomor 170/644/409.040/2007 tgl 25 September 2007	Ketua DPRD
15.	12/03/2008 09/BPPM/III/2008	Surat PT BPPM kepada Bupati Perihal Permohonan Pengambilan Sertipikat Asli	Dirut PT BPPM
16.	12/03/2008 10/BPPM/III/2008	Surat PT BPPM kepada Bupati perihal Permohonan Menjadikan Agunan Obyek Kerjasama Operasional dan Melakukan Pemecahan Sertipikat	Dirut PT BPPM
17.	13/03/2008 028/110/409.306/2008	Berita Acara Serah Terima Sertipikat Asli dari Pemkab Blitar kepada PT BPPM	Sekdadan Dirut PT BPPM
18.	16/04/2008 028/135/409.306/2008	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan pembayaran keuntungan dan kompensasi tanah Jatilengger	Sekda
19.	18/04/2008 00005/STS/1.20.13.01/2008	Setorandari PT BPPM sebesar Rp. 130.000.000.-	BendaharaPenerima
20.	02/05/2008 000006/STS/1.20.13.01/2008	Setorandari PT BPPM sebesarRp. 76.836.750.-	BendaharaPenerima
21.	03/06/2008 188/218/409.012/KPTS/2008	Keputusan Bupati Blitar tentang Penghapusan Dari Daftar Inventaris Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Blitar di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok	Bupati
22.	17/06/2008 170/193/409.306/2008	Surat Bupati kepada Ketua DPRD Nomor : 170/193/409.306/2008 perihal Pencabutan Surat DPRD Kab. Blitar Nomor : 170/644/409.040/2007 tanggal 25 September 2007	Bupati
23.	29/06/2008 028/213/409.306/2008	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan pembayaran keuntungan dan kompensasi tanah Jatilengger	Sekda
24.	08/07/2008 170/363/409.206/2008	Surat Ketua DPRD kepada Bupati Blitar Nomor : 170/363/409.040/2008 perihal Penegasan pencabutan surat DPRD Kabupaten Blitar Nomor : 170/644/409.040/2007 tanggal 25	Ketua DPRD
25.	19/08/2008 028/258/409.306/2008	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan ke II pembayaran keuntungan dan kompensasi tanah Jatilengger	Sekda
26.	29/10/2008 028/304/409.306/2008	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan ke III pembayaran keuntungan dan kompensasi tanah Jatilengger	Sekda
27.	30/01/2009 028/14/409.306/2009	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan ke IV pembayaran keuntungan dan kompensasi tanah jatilengger	Sekda

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
28.	03/08/2009 58/PPI/BPPM/VIII/2009	Surat kepada Bupati perihal Permohonan Tukar Menukar Lahan Proyek Puri Ponggok Indah	Dirut PT BPPM
29.	21-Agt-09	Laporan Hasil Pansus DPRD Pembahas Permasalahan Tanah Untuk Perumahan di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.	Ketua Pansus
30.	17/09/2009 028/825/409.116/2009	Surat kepada PT BPPM perihal Tanah Pengganti Perumahan di Desa Jatilengger Ponggok	Kepala DPPKAD
31.	30/10/2009 028/991/409.116/2009	Surat kepada PT BPPM perihal Tanah Pengganti Perumahan di Desa Jatilengger Ponggok	Bupati
32.	14/12/2009 028/1157/409.116/2009	Surat kepada PT BPPM perihal Tanah Pengganti Perumahan di Desa Jatilengger Ponggok	Bupati
33.	21/04/2010 21/BPPM/IV/2010	Surat Jawaban/Penjelasan Tanah Pengganti Perumahan di Desa Jatilengger Ponggok	Dirut PT BPPM
34.	24/06/2010 956/562/409.116/2010	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan Profit Sharing dan Denda Keterlambatan, sebagai tindak lanjut temuan BPK	Kepala DPPKAD
35.	29-Jun-10	Surat Pernyataan PT BPPM rencana pembayaran	Dirut PT BPPM
36.	29/06/2010 30/VII/2010	Setoran dari PT BPPM sebesar Rp. 25.000.000.-	Bendahara Penerimaan
37.	08/07/2010 956/595/409.116/2010	Surat Tagihan ke-2 profit sharing dan denda keterlambatan, sebagai tindak lanjut temuan BPK	Sekda
38.	13/12/2010 956/1101/409.116/2010	Surat Tagihan Profit Sharing + Denda Keterlambatan dan Tanah Pengganti	Bupati
39.	20/07/2011 956/926/409.116/2011	Tagihan ke-4 Profit Sharing + Denda Keterlambatan dan Tanah Pengganti	Bupati
40.	28-Jul-11	Surat Pernyataan kesanggupan membayar profit sharing dan menyediakan tanah pengganti	Direktur & Komisaris PT BPPM
41.	29-Jul-11	Surat Pernyataan kesanggupan membayar pembagian keuntungan paling lambat 30 September 2011	Direktur & Komisaris PT BPPM
42.	29-Jul-11	Surat Pernyataan kesanggupan membayar pembagian keuntungan paling lambat 31 Desember 2011	Direktur & Komisaris PT BPPM
43.	05/08/2011 010/BPPM/PB/VIII/2011	Surat kepada Bupati perihal Profit Sharing + Denda Keterlambatan dan Tanah Pengganti	Direktur PR BPPM
44.	26/08/2011 19a/STS/1.20.05.01/2011	Setoran dari PT BPPM sebesar Rp. 50.000.000.-	Bendahara Penerimaan
45.	08/09/2011 011/BPPM/PB/IX/2011	Surat kepada Bupati perihal Profit Sharing + Denda Keterlambatan dan Tanah Pengganti	Direktur PT BPPM

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
46.	29/09/2011 015/BPPM/PB/IX/2011	Surat kepada Bupati perihal Permohonan Penundaan Jadwal Pembayaran Profit Sharing	Direktur PT BPPM
47.	19/10/2011 13b/10/STS/1.20.05.01/2011	Setorandari PT BPPM sebesarRp. 24.000.000.-	Bendahara Penerimaan
48.	24 Pebruari 2012 956/226/409.116/2012	Surat kepada PT BPPM perihal Tagihan ke-5 Profit Sharing + Denda Keterlambatan dan Tanah Pengganti	Bupati
49.	15/03/2012 005/BPPM/PB/III/2012	Surat dari PT BPPM perihal Konfirmasi Pelaksanaan Hasil Pansus DPRD 2009	Direktur PT BPPM
50.	31/08/2012 41/VIII/2012	Setoran dari PT BPPM sebesar Rp. 500.000.000.-	Bendahara Penerimaan
51.	09/09/2012 45/IX/2012	Setoran dari PT BPPM sebesar Rp. 500.000.000.-	Bendahara Penerimaan
52.	09/11/2012 57/XI/2012	Setoran dari PT BPPM sebesarRp. 158.709.000.-	Bendahara Penerimaan
53.	12 Pebruari 2013 028/110/409.116/2013	Surat Bupati Blitar Nomor 028/110/409.116/2013 perihal Penjelasan Setoran atas Kompensasi Tanah, bahwasetoran PT. BPPM atas kompensasi tanah sebesarRp. 834.600.000.-oleh Pemkab Blitar masih dicatat sebagai uang titipan.	Bupati
54.	06/03/2013 028/22/409.212/2013	Surat Bupati Nomor 028/22/409.212/2013 kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan perlakuan atas pembayaran kompensasi tanah perumahan Jatilengger, menindaklanjuti temuan BPK.	Bupati
55.	04-Jul-13	Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Permasalahan Tanah Perumahan Jatilengger dipimpin oleh Bupati.	Peserta Rapat
56.	28-Agt-13	Penerbitan SP2D Nomor : 00132/SP2D-NA/1.20.2.1/2013 tentangPencairanUangTitipan PT BPPM keKasUmum Daerah KabupatenBlitarsebesarRp. 834.600.000.-	Kuasa BUD
57.	11/12/2013 070/BPPM/PB/XII/2013	Surat dari PT BPPM Nomor : 070/BPPM/PB/XII/2013 perihal Penyediaan Tanah Pengganti Perumahan Jatilengger	Direktur PT BPPM
58.	24/12/2013 028/702/409.212/2013	Surat Bupati kepada Ketua DPRD Nomor : 028/702/409.212/2013 perihal Permohonan penjelasanatas proses tukarguling tanah Jatilengger	Bupati
59.	27/12/2013 170/1473/409.040/2013	Surat Ketua DPRD kepada Bupati Nomor : 170/1473/409.040/2013 perihal Penjelasan Permasalahan Tanah di DesaJatilengger Kecamatan Ponggok	Ketua DPRD

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
60.	26 Pebruari 2014 06/BPPM/PB/II/2014	Surat PT BPPM Nomor : 06/BPPM/PB/II/2014 Perihal Konfirmasi tanah pengganti untuk tukar menukar	Direktur PT BPPM
61.	26 Pebruari 2014	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Blitar dengan PT Bina Permai Makmur Nomor : 119/I.04/409.011/2014 dan Nomor : 07/BPPM/PB/II/2014 tentang Tukar Menukar Sebidang Tanah Untuk Keperluan pembangunan Perumahan Sederhana Bagi PNS, Anggota TNI-POLRI, dan	Bupati dan Direktur PT BPPM
62.	07-Mar-14	Surat Direktur PT BPPM perihal Penyerahan Sertipikat Tanah Pengganti	Direktur PT BPPM
63.	10-Mar-14	Berita Acara Serah Terima Sertipikat Tanah pengganti dari PT BPPM kepada Bupati Blitar	Bupatidan Direktur PT BPPM
64.	21/05/2014 032/538/409.212/2014	Surat Bupati kepada Ketua DPRD Nomor : 032/538/409.212/2014 perihal Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger	Bupati
65.	26/08/2014 170/0867/409.040/2014	Surat Ketua DPRD kepada Bupati Blitar Nomor : 170/0867/409.040/2014 perihal Penyampaian Berita Acara (Hasil Sidang Paripurna)	Ketua DPRD
66.	29/09/2014 032/1032/409.212/2014	Surat Bupati kepada Ketua DPRD Nomor : 032/1032/409.212/2014 perihal Permohonan Penjelasan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger	Bupati
67.	27 Oktober 2014 170/1030/409.040/2014	Surat Ketua DPRD kepada Bupati Blitar Nomor : 170/1030/409.040/2014 perihal Penjelasan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger - DPRD menyatakan belum bisa memberikan penjelasan karena lat kelengkapan Dewan belum terbentuk	Ketua DPRD
68.	5 Maret 2015 032/249/409.212/2015	Surat Bupati Blitar kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar Nomor : 032/249/409.212/2015 perihal Permohonan Penjelasan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger - Inti Surat : DPRD agar dapat memberikan penjelasan karena alat kelengkapan Dewan sudah terbentuk	Bupati
69.	15 November 2017 028/1832/409.204.5/2017	Surat Bupati Blitar kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar Nomor : 028/1832/409.204.5/2017 perihal : Penyelesaian permasalahan tanah aset Jatilengger. - Inti Surat : Permohonan agar DPRD dapat menerima tanah pengganti yang telah disediakan oleh PT. BPPM	Bupati

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
70.	17 Januari 2018	Rapat Paripurna DPRD kabupaten Blitar dalam rangka penjelasan Bupati terhadap permasalahan Tanah aset Jatilengger - Inti Sambutan : Agar DPRD dapat menyetujui tanah pengganti yang telah disediakan oleh PT. BPPM	Bupati
71.	17 Januari 2018	Rapat Paripurna DPRD kabupaten Blitar dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD - Inti Pandangan Umum dari 6 Fraksi : - Fraksi memahami bahwa permasalahan Jatilengger adalah permasalahan yang sudah lama - Fraksi berkeinginan untuk segera menyelesaikan - Fraksi mempercayakan pembahasan pada anggota yang nanti duduk dalam pansus	Ketua DPRD
72.	18 Januari 2018	Rapat Paripurna DPRD kabupaten Blitar dalam rangka Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD - Inti Sambutan : Pihak Eksekutif mengucapkan trima kasih atas pemahaman fraksi-fraksi dan keinginan untuk menyelesaikannya	Bupati
73.	30 Januari 2018	Laporan Kegiatan Pansus X DPRD dalam rapat kerja Bersama BPKAD dan Bagian hukum Setda Kab Blitar - Inti Laporan : 1. Pelepasan Tanah Jatilengger dengan sistem tukar menukar harus mengacu pada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. 2. Belum ada Kajian sebagai bahan pertimbangan DPRD 3. Diperintahkan kepada Kepala BPKAD untuk melakukan kajian Tanah Jatilengger dan Tanah Penggantinya	Ketua Pansus
74.	31 Januari 2018 188/135/409.204.05/2018	Surat Sekda Kab Blitar kepada KPKNL malang No. 188/135/409.204.05/2018 - perihal : Permohonan penilaian tanah untuk tukar menukar - Inti Surat : Permohonan agar KPKNL malang dapat melakukan Apraisal/Penilaian 2 Bidang Tanah yang akan menjadi obyek tukar menukar	Asisten Administrasi dan Umum

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
75.	5 Februari 2018 S-130/WKN.10/KNL.03/2018	Surat dari KPKNL Malang Kepada Sekda Kabupaten Blitar No. S-130/WKN.10/KNL.03/2018 - perihal : Permohonan penilaian tanah untuk tukar menukar - Inti Surat : 1. Penilaian tidak bisa memberikan opini nilai dimasa lampau terkait nilai tanah di Desa Jatilengger pada saat masih dimiliki oleh Pemkab Blitar (Dokumen kepemilikan masih berupa SHP) atau sebelum dilakukan pelepasan hak kepada PT. BPPM; dan 2. Apabila penilaian dilakukan saat ini dalam rangka tukar menukar, maka secara aspek legalitas tidak terpenuhi karena saat ini dokumen kepemilikan objek penilaian dari pihak Pemkab Blitar adalah SHGB a.n. PT. BPMM yang menunjukkan bahwa saat ini pemegang hak dari tanah tersebut bukan Pemkab Blitar	Kepala KPKNL Malang
76.	6 Maret 2018	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam rangka Laporan hasil Pansus X DPRD kabupaten blitar pembahasan permasalahan tanah aset jatilengger Kesimpulan Pansus : 1. Belum dapat menyetujui permohonan sdr. Bupati sesuai Surat Tanggal 15 Nopember 2017 No. 028/1832/409,204,05/2017 2. Dalam Hal pelepasan tanah aset hendaknya sdr. Bupati mematuhi Permendagri No. 17 yang tgelah diubah menjadi Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Sesuai hasil VERifikasi dari KPKNL Malang tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor s.310/WKN.10/KNL.03/2018 penelian tidak bisa dilaksanakan karena :	Ketua DPRD

No. Dok	Tanggal dan Nomor	Uraian	Penandatanganan Surat
		a. Penilaian tidak bisa memberikan opini nilai dimasa lampau terkait nilai tanah di Desa Jatilengger pada saat masih dimiliki oleh Pemkab Blitar (Dokumen kepemilikan masih berupa SHP) atau sebelum dilakukan pelepasan hak kepada PT. BPPM; dan b. Apabila penilaian dilakukan saat ini dalam rangka tukar menukar, maka secara aspek legalitas tidak terpenuhi karena saat ini dokumen kepemilikan objek penilaian dari pihak Pemkab Blitar adalah SHGB a.n. PT. BPMM yang menunjukkan bahwa saat ini pemegang hak dari tanah tersebut bukan Pemkab Blitar 4. Pansus mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta Fatwa Kementerian Dalam Negeri dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk penyelesaian permasalahan tanah aset di Jatilengger	